

# Kalimantan Timur



# Kabupaten Berau

Wilayah  
**12,7**  
Juta ha

Kawasan Hutan  
**8,2**  
Juta ha

Wilayah  
**3,4**  
Juta ha

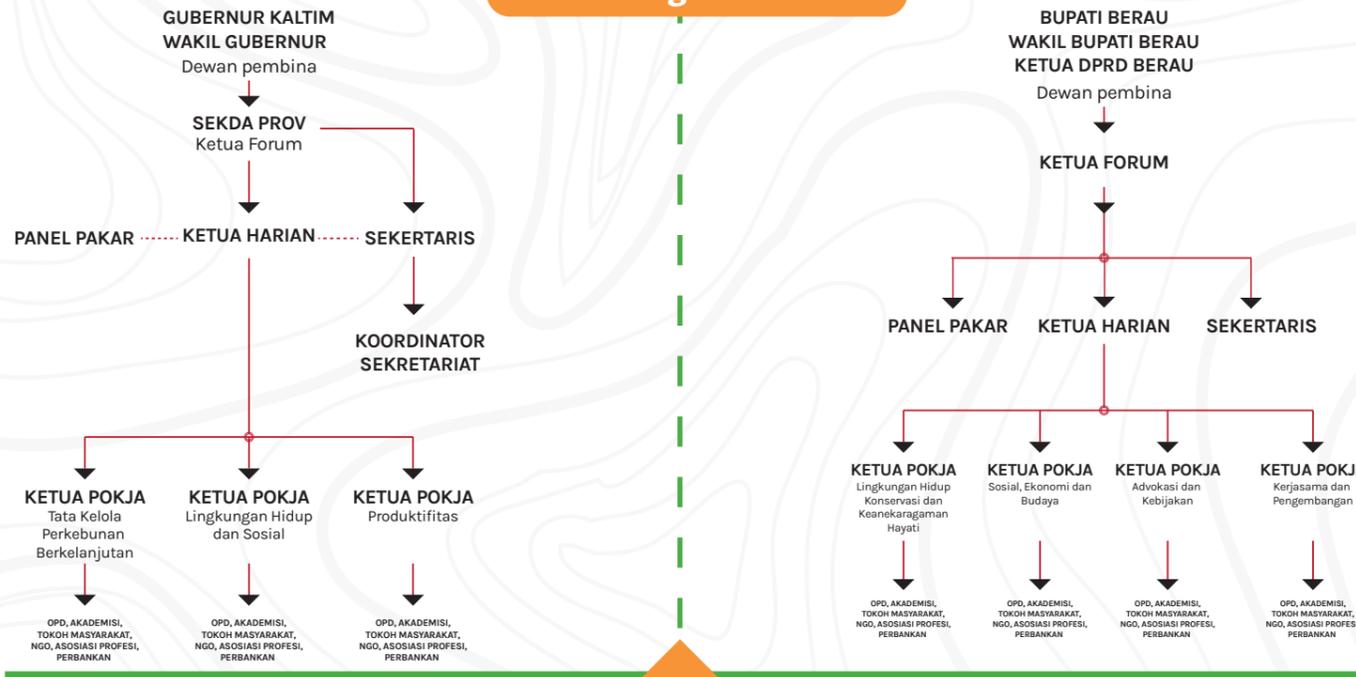
Kawasan Hutan  
**2,5**  
Juta ha

## Komoditas Unggulan

1,2 juta ha	<b>Sawit</b>	135 ribu ha
118.773 ha	<b>Karet</b>	6.173 ha
21.372 ha	<b>Kelapa</b>	2.443 ha
7.508 ha	<b>Kakao</b>	1.625 ha
9.146 ha	<b>Lada</b>	2.594 ha

Luas area perkebunan (2020)

## Struktur Organisasi FKPB



## Kolaborasi Hijau untuk Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan

Pengelolaan perkebunan berkelanjutan menjadi kunci dalam program penguatan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan perlindungan kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Hal tersebut menjadi bagian dalam program prioritas pemerintah Indonesia. Pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan pun menjadi bagian penting yang terus dikembangkan demi mendukung kesehatan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi dengan kekayaan ekologi dan ekonomi tertinggi di Indonesia. Provinsi dengan wilayah seluas 12,7 juta hektare ini mendapatkan kontribusi ekonomi berbasis sumber daya alam dari sekitar 7,3 juta hektare hutan tropis. Sektor perkebunan kelapa sawit, dengan luas area mencapai 1,37 juta hektare, menjadi komoditas strategis bagi pembangunan perekonomian daerah dan masyarakat.

Meski demikian, Kalimantan Timur juga menghadapi tantangan berupa warisan tiga dekade degradasi hutan akibat pengelolaan hutan alam, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan yang tidak berkelanjutan.

**Bingka Kaltim**  
(Bincang Komoditas Perkebunan Lestari Kalimantan Timur)  
"Mengagas Peta Jalan Pembangunan Hijau Berau Melalui Investasi Komoditas Lestari"

Rabu 7 Oktober 2020

**Narasumber:** Dr. Cecilia A. W., M.Si., Tita Retna, S.T., LLM., Ir. Ujang Rachmad, M.Si., Dinas Perkebunan Kalimantan, Ir. Rahmawati, Dinas Perkebunan Berau, Dr. H. Syarifuddin L., WPU, STP, Kementerian Berau.

**Moderator:** Metafanda, SH., MH., Dr. Akbar Ruli, Bruce M. Motta, ST., MSi., Ir. H. Agus Wahidun, MSc, DPRD Berau, Ir. H. Agus Wahidun, MSc, Kabupaten Berau.

**Bingka Kaltim**  
(Bincang Komoditas Perkebunan Lestari Kalimantan Timur)  
"Mencermati Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan"

8 20  
Maret 21  
09.00 - 12.30 WITA  
08.00 - 11.30 WIB

**Narasumber:** Kabagkum, Dikjenbun, Kementerian RI, Eddy Martono, KADRO, Adhama Eryon, ICS, Indonesia Centre for Environmental Law, Alek Kard Komarwan, Gubernur Kalimantan (The Daily Callcenter Berau).

**Panelis:** Ir. Ujang Rachmad, M.Si., Moderator: Metafanda, SH., MH.

**Bingka Kaltim**  
(Bincang Komoditas Perkebunan Lestari Kalimantan Timur)  
"Mengurai Strategi Pemasaran Lada Kalimantan Timur di Pasar Global"

27 OKTOBER 2021  
09.00 - 12.30 WITA

**Narasumber:** Dr. M. Taufik, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kota Berau, Ir. Ridwaning, MP, Fakultas Pertanian, Universitas Kalimantan, Ir. Ujang Rachmad, M.Si., Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, M. Kholidin, Kepala Desa Kalimantan Timur, M. Rafli, WPU, Provinsi Berau Bering.

**Panelis:** 1. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan, 2. Bupati/Kabupatun Kabupaten Berau, 3. Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, 4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Berau, 5. Fakultas Pertanian UNMUL Samarinda.

**Moderator:** Rahma Aila, Perwakilan UCA, Yohan, Yayasan Konservasi Alam Nusantara.

**Moderator:** Metafanda, SH., MH., Moderator: I Ketut Suswanta, Kepala Dinas UICP Kab. Berau, Kadek Surya P. W., Kepala Dinas UICP Gowa.

## Kiprah FKPB untuk Perkebunan Berkelanjutan

**2016** Komitmen kerja sama multipihak untuk mendorong pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kalimantan Timur bergulir.

**2018** **Desember:** FKPB Provinsi Kalimantan Timur terbentuk.

**2019** **April:** Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan SK. Pengangkatan Pengurus FKPB Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2022. **Juli:** FKPB Kabupaten Berau terbentuk. **Oktober:** Pemerintah Kabupaten Berau menerbitkan SK. Pengangkatan Pengurus FKPB Kabupaten Berau periode 2019-2022. **Desember:** Pelantikan pengurus FKPB Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2022.

**2020** **April:** Kabupaten Berau menerbitkan regulasi mengenai penetapan peta indikatif area dengan nilai konservasi tinggi di kawasan perkebunan seluas 83 ribu hektare. **Oktober:** FKPB bersama YKAN menggelar webinar Bingka Kaltim perdana membahas peta jalan pembangunan hijau di Kabupaten Berau melalui investasi komoditas lestari.

**2021** FKPB bersama YKAN melanjutkan menggelar rangkaian empat webinar Bingka Kaltim. **November:** Gubernur Kalimantan Timur mengesahkan regulasi mengenai kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) dan pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi di area perkebunan.

**2022** **Maret:** Seri terakhir webinar Bingka Kaltim yang membahas pengembangan areal sebagai komoditas pangan Kalimantan Timur ditayangkan daring.

Ditambah lagi adanya kebakaran hutan akibat dampak aktivitas manusia dan fenomena iklim El Nino.

Kondisi itu jelas akan berdampak serius pada kesejahteraan masyarakat dan kesehatan ekosistem Kalimantan Timur. Pembangunan hijau dan pengelolaan perkebunan berkelanjutan lewat kolaborasi multipihak: pemerintah, akademisi, pelaku industri perkebunan, dan masyarakat, dapat menjadi solusi strategis untuk keberlanjutan hutan dan sumber daya alam.

Dalam mengembangkan kolaborasi untuk pembangunan hijau berkelanjutan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Deutsche für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Climate Policy Initiative (CPI), Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur serta para mitra strategis lainnya. Mereka mengembangkan kegiatan kerja sama dalam kerangka inisiatif Kesepakatan Pembangunan Hijau (*Green Growth Compact*) yang resmi diluncurkan pada Mei 2016.

## Wadah Komunikasi Dunia Perkebunan

Kolaborasi multipihak untuk pembangunan hijau bertujuan mendukung aktivitas sektor perkebunan di Kalimantan Timur yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi. Dengan demikian, program ini juga dapat mendukung percepatan transformasi ekonomi hijau di Kalimantan Timur. Kerja sama multipihak tersebut juga akan mampu mencapai hasil pembangunan untuk masyarakat yang lebih besar dibanding jika mereka bekerja sendiri-sendiri.

Program kolaborasi ini juga mendapatkan dukungan besar dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Salah satu amanat dalam regulasi daerah ini adalah membentuk Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan (FKPB) yang berisi unsur multipihak. Forum ini dibentuk masing-masing satu lembaga di tingkat provinsi dan kota/kabupaten.

Sebelum terbentuknya FKPB, sudah ada forum-forum komunikasi para pembangun kepentingan sektor perkebunan. Meski demikian, tetap diperlukan satu wadah yang dapat menampung seluruh kebutuhan mereka dan menjadi saluran komunikasi untuk menyelesaikan masalah di sektor perkebunan secara bersama-sama. Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) berperan membantu melahirkan FKPB di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau. Kedua Forum ini juga mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan perkebunan berkelanjutan.

FKPB menjadi wadah strategis merangkul para pemangku kepentingan terkait program perkebunan berkelanjutan. Organisasi ini berisi berbagai perwakilan pemerintah daerah, perorangan atau korporasi, asosiasi profesi, akademisi, dan lembaga non-pemerintah yang bekerja sama memajukan pembangunan perkebunan berkelanjutan. Forum ini menjadi wadah komunikasi dalam merumuskan, memfasilitasi, dan mencari solusi dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan dan penyelesaian tantangan di sektor perkebunan.

FKPB Provinsi Kalimantan Timur resmi dibentuk pada Desember 2018 dengan dukungan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 yang ditandatangani Gubernur Isran Noor. Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DDPI memberikan dukungan penuh, baik materi dan teknis, kepada pemerintah daerah Kalimantan Timur dalam mengakselerasi pembentukan FKPB tersebut.

Adapun daerah yang dipilih sebagai percontohan pembentukan FKPB tingkat kabupaten adalah Kabupaten Berau. Daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam berupa 2,2 juta hektare hutan atau sekitar 75 persen dari total luas wilayahnya. Kabupaten Berau juga memiliki perkebunan sawit seluas 135 ribu hektare. Selain itu Kabupaten Berau juga memiliki wilayah perkebunan komoditas unggulan seperti lada, kelapa, karet, kakao, dan kopi. FKPB Kabupaten Berau diresmikan pada Juli 2019 lewat Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 yang ditandatangani Bupati Muharram.

## Kerja Sama Memajukan Pembangunan Hijau Berkelanjutan

Melalui telaah kelompok-kelompok kerjanya, FKPB berhasil mengidentifikasi sejumlah tantangan di sektor perkebunan yang perlu diselesaikan, antara lain peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan pekebun, akses pendanaan dan pengembangan teknologi perkebunan, serta optimalisasi pemanfaatan lahan berizin dan penyelesaian konflik lahan. Selain itu, sosialisasi regulasi perkebunan berkelanjutan dan percepatan sertifikasi perkebunan terus dilakukan.

Kegiatan FKPB ini juga sejalan dengan program pembangunan hijau yang telah dikembangkan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur. Pada 2018, Gubernur Kalimantan Timur merilis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Regulasi ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan FKPB mendapat respon positif dari para pemangku kepentingan dan masyarakat perkebunan di Kalimantan Timur. Lembaga itu menjadi jembatan informasi bagi para pelaku usaha perkebunan dan ikut mendorong terbitnya regulasi daerah yang menyokong pembangunan hijau yang berkelanjutan. Lembaga ini menggelar diskusi dan pelatihan perkebunan serta menjadi tempat urun rembuk dalam menyelesaikan isu dan permasalahan di sektor perkebunan.

Merebaknya pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 sempat membuat kegiatan luring FKPB tersendat. Meski demikian, Forum yang didukung penuh Dinas Perkebunan Kalimantan Timur dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara ini berinovasi termasuk menggelar rangkaian webinar bertajuk “Bingka Kaltim” (Bincang Komoditas Lesatari Kalimantan Timur). Webinar ini menjadi salah satu program andalan FKPB dalam meningkatkan kolaborasi sektor perkebunan selama masa pandemi Covid-19.

Program acara Bingka Kaltim yang didukung oleh YKAN ini menghadirkan para pakar dan praktisi dalam membahas isu perkebunan. Enam topik yang

telah dibahas di acara Bingka Kaltim adalah:

1. Peta jalan pembangunan hijau di Kabupaten Berau dengan komoditas lestari.
2. Rantai pasok dan hilirisasi kakao Berau menuju pasar ekspor.
3. Mencermati Undang-Undang Cipta Kerja di sektor pembangunan perkebunan berkelanjutan.
4. Strategi pemasaran lada Kalimantan Timur di pasar global.
5. Sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur.
6. Prospek pengembangan komoditas aren mendukung kebutuhan pangan di Kalimantan Timur.

Dalam aktivitasnya, FKPB juga terus mendorong peningkatan kesehatan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Organisasi ini ikut mendorong pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi dan pendekatan yurisdiksi untuk sertifikasi perkebunan berkelanjutan. Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur merilis Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kriteria Area Bernilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Area Perkebunan dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Area Perkebunan.

Dalam tempo tiga tahun, FKPB telah menghasilkan karya-karya yang signifikan dalam pemajuan pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Model organisasi sebagai wadah komunikasi multipihak ini bisa menjadi panduan dalam pengembangan lembaga serupa di daerah lain di Indonesia. Inisiatif kerja sama yang apik ini diharapkan dapat dikembangkan ke skala yang lebih luas untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun perkebunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

### Regulasi sektor perkebunan Provinsi Kalimantan Timur setelah FKPB terbentuk.

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 52/2018 tentang Pembentukan FKPB tingkat provinsi
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 525/2019 tentang Pengangkatan Pengurus FKPB
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 12/2021 tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43/2021 tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi
- Peraturan Bupati Berau No. 52/2019 tentang Pembentukan FKPB tingkat kabupaten
- Surat Keputusan Bupati Berau No. 595/2019 tentang Pengangkatan Pengurus FKPB
- Peraturan Daerah No. 3/2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan
- Surat Keputusan Bupati Berau No. 287/2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Perlindungan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi
- Surat Keputusan Bupati Berau No. 213/2021 tentang Aplikasi Pratinjau Usulan perizinan Berbasis Lahan